

Tantangan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Upaya Peningkatan Akses Kesehatan

ANALISIS SITUASI DAN PERMASALAHAN

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu dengan biaya yang terjangkau melalui perlindungan finansial. Beberapa dimensi yang mempengaruhi permasalahan dalam mengakses pelayanan kesehatan yaitu *accessibility* (keterjangkauan lokasi), *availability* (ketersediaan),

acceptability (penerimaan oleh masyarakat), *affordability* (keterjangkauan biaya), *accomodation* (kenyamanan) dan *awareness* (kesadaran).

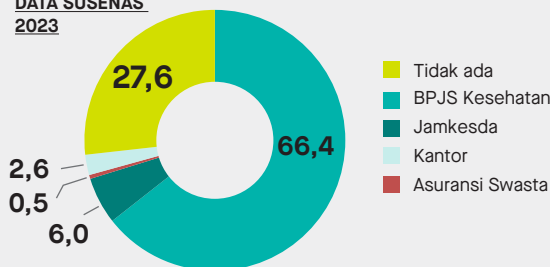
Transformasi sistem pembiayaan berfokus pada upaya memberikan kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan yang berkualitas terutama masyarakat golongan kurang mampu serta memastikan pembiayaan kesehatan yang cukup, adil, efektif dan efisien.

HASIL SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023

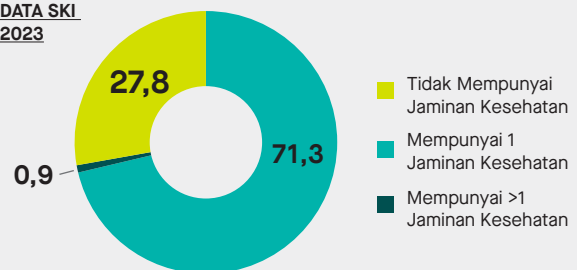


27,8% penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan yang masih berlaku. Angka ini hampir sama dengan data Susenas 2023 yaitu **27,6%**.

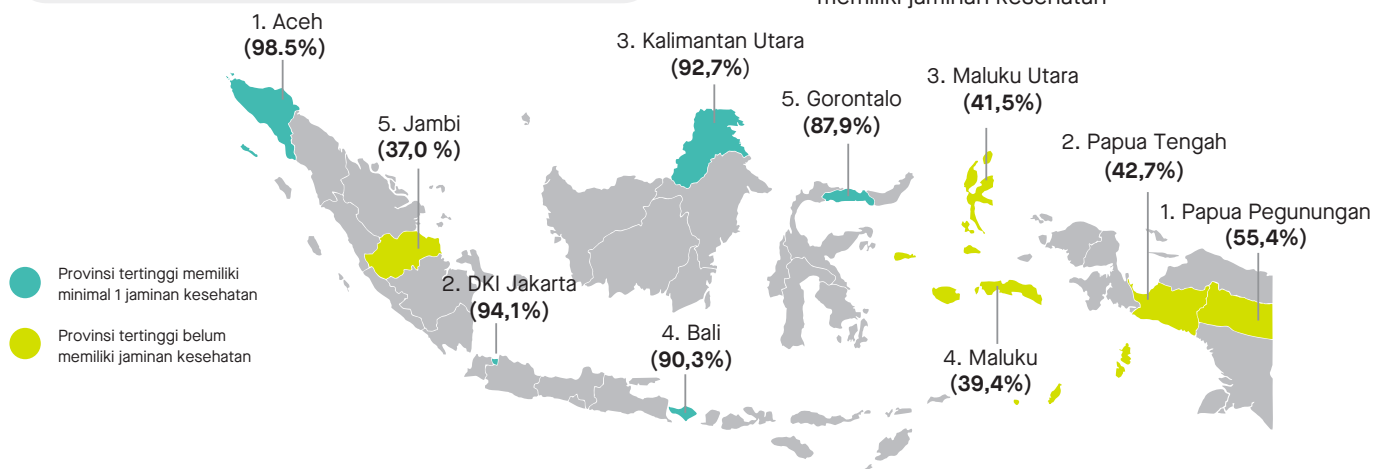
DATA SUSENAS 2023



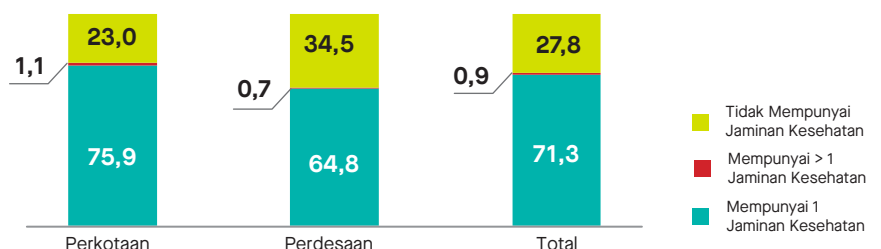
DATA SKI 2023



Lima provinsi dengan persentase kepemilikan minimal 1 jaminan kesehatan terbanyak dan lima provinsi dengan persentase terbanyak belum memiliki jaminan kesehatan

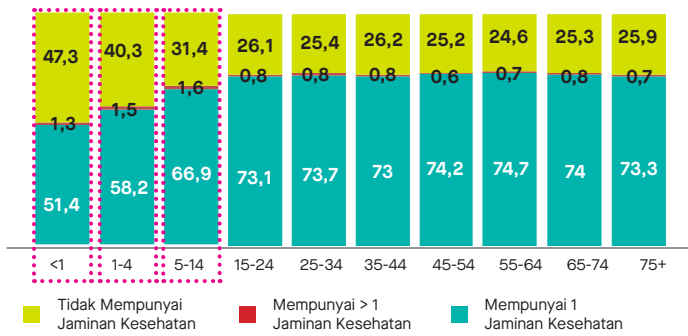


Penduduk perkotaan lebih banyak yang memiliki jaminan kesehatan dibanding penduduk pedesaan (**77,0%** dibandingkan **65,5%**).

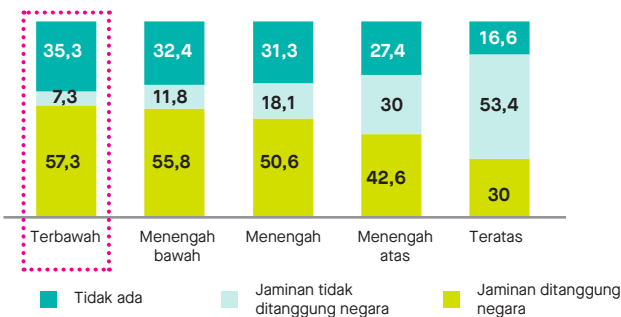




Sebanyak **47,3%** anak berusia <1 tahun, **40,3%** anak berusia 1-4 tahun dan **31,4%** anak berusia 5-14 tahun tidak memiliki jaminan kesehatan

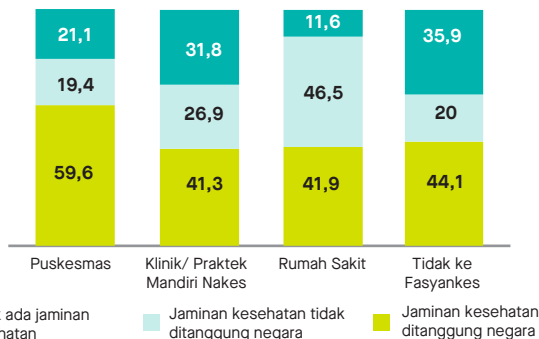


Sebagian besar pembiayaan digunakan untuk melindungi masyarakat ekonomi terbawah sampai menengah bawah. Namun masih ada **35,5%** masyarakat yang berada di kuintil ekonomi terbawah belum memiliki jaminan kesehatan.



Facilitas kesehatan belum diakses secara merata

- Layanan kesehatan di Puskesmas diakses oleh lebih dari setengah rumah tangga (**59,6%**) yang memiliki jaminan kesehatan ditanggung negara (PBI dan Jamkesda)
- Dalam satu tahun terakhir **44,1%** rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan ditanggung negara (PBI dan Jamkesda) dan **35,9%** rumah tangga tanpa jaminan kesehatan, tidak mengakses layanan kesehatan.



Sebanyak **50,7%** kelompok usia 18-59 tahun dengan keterbatasan/disabilitas tidak memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang paling sering dikunjungi (**24%**) oleh penduduk pada kelompok tersebut.



1 per 1.000 rumah tangga Indonesia pernah mengakses pelayanan kesehatan di luar negeri dalam 3 tahun terakhir, dan Malaysia menjadi negara yang paling banyak dituju. Alasan pemilihan layanan kesehatan di luar negeri karena fasilitasnya lengkap (**93,5%**) dan layanannya sesuai harapan (**91,7%**). Lima provinsi terbanyak mengakses:



KESIMPULAN

- Terdapat 27,8% penduduk Indonesia yang masih belum memiliki jaminan kesehatan yang masih berlaku.
- Lima provinsi terbanyak yang penduduknya tidak memiliki jaminan kesehatan adalah: Papua Pegunungan (55,4%), Papua Tengah (42,7%), Maluku Utara (41,5%), Maluku (39,4%), dan Jambi (37,0%).
- Lebih dari setengah rumah tangga (59,6%) yang memiliki jaminan kesehatan ditanggung negara (PBI dan Jamkesda) menggunakan Layanan kesehatan di Puskesmas.
- Dari hasil SKI 2023 tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan cakupan kepesertaan dan ketepatan penetapan sasaran jaminan kesehatan serta peningkatan akses kesehatan.

*Bahan dapat dilihat di www.badankebijakan.kemkes.go.id